

**Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap Gelandangan
dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi**
***A Case Study on Aftercare Service of Ex-homeless and Beggar Social
Rehabilitation in Pangudi Luhur Social Institution Bekasi***

Ruaida Murni

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, Telp. 021-8017146, Fax. 021-8017126.
ruaidamurni@yahoo.co.id > Diterima 2 Januari 2014, direvisi 20 Maret 2014, disetujui 22 Mei 2014.

Abstract

This case study is to describe the service and rehabilitation process done by PSKBKPL, on advanced education, understand institution apparatus, advanced education implementation, and supporting and handicap factors. The research result hoped can give an input to the Directory of Social Handicap Service to set a policy on service and rehabilitation implementation for homeless and beggar on advanced education done by PSBKPL. This research is evaluation with qualitative technique. The result shows that service and rehabilitation process by PSBKPL based on guidance made by the Directory of Social Handicap Service, because there is inadequate understanding between advanced education and evaluation-monitoring (Monev), caused advanced education and monev are done at the same time and place. Advanced education output shows that economically the lives of ex-educated members majority are still hand-to-mouth conDirektoran, but the change of attitude showed through working effort and their spirit to enhance it for not to be back in homeless and beggar. Only small numbers of ex-educated, with several reasons, back in conDirektoran they used to be. Handicap that felt by apparatus is that the issue has not been thought proporsionally, such as fund limitation, has not special guidance, there has not been yet role from the sending institution and community, and there is no advanced assistance to develop entrepreneurship, that causes ex-social educated are not be able to develop as maximum.

Keywords:

Homeless and Beggar-PSBKPL-Advanced Education

Abstrak

Studi kasus ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelayanan dan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh PSBKPL, pembinaan lanjut; pemahaman petugas panti, pelaksanaan pembinaan lanjut, dan faktor penghambat dan pendukung. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Direktorat Pelayanan Tunasosial dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis serta pembinaan lanjut yang dilaksanakan oleh PSBKPL. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan PSBKPL berdasarkan panduan yang disusun oleh Direktorat Pelayanan Tunasosial, karena adanya kekurangpahaman antara pengertian pembinaan lanjut dan monitoring evaluasi (monev), mengakibatkan pelaksanaan pembinaan lanjut dan monev dilakukan secara bersamaan di lokasi yang sama. Hasil bimbingan lanjut menunjukkan secara ekonomi kehidupan sebagian besar eks warga binaan sosial (WBS) masih pas-pasan, tetapi perubahan sikap eks WBS Direktorat tunjukkan melalui berbagai usaha kerja yang dilakukan dan keinginan untuk meningkatkan usahanya, sehingga tidak lagi kembali sebagai gelandangan dan pengemis. Sebagian kecil eks WBS dengan berbagai alasan terpaksa kembali ke kegiatan semula. Hambatan yang dirasakan petugas dalam melaksanakan pembinaan lanjutan adalah belum mendapatkan perhatian proporsional, seperti anggaran yang terbatas, belum memiliki panduan khusus, belum adanya peran lembaga pengirim dan masyarakat, serta tidak adanya bantuan lanjutan untuk pengembangan usaha, mengakibatkan eks warga binaan sosial tidak dapat mengembangkan usahanya secara maksimal.

Kata Kunci:

Gelandangan dan Pengemis-Panti Sosial Bina Karya-Bimbingan Lanjut

A. Pendahuluan

Panti sosial yang merupakan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial disebutkan dalam Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial

atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Panti Sosial Bina Karya (PSBK) mempunyai

tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis dan orang terlantar agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Kepmensos No 50/HUK/2004). Pelayanan dan rehabilitasi sosial dilakukan dengan tahap-tahap kegiatan sesuai dengan panduan yang disediakan.

Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur (PSBKPL) Bekasi sebagai lembaga pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, melaksanakan kegiatan untuk membantu menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis. Informasi awal menunjukkan bahwa ketika PSBKPL melakukan tahapan pelayanan dan rehabilitasi, tercatat beberapa warga binaan sosial sebelumnya telah mengikuti rehabilitasi di panti sejenis di wilayah lain. Hal ini terkait dengan belum mampunya eks klien di panti bersangkutan untuk mandiri sesuai dengan tujuan rehabilitasi. Hal tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pada eks klien atau warga binaan sosial (WBS) PSBK yang lain. Diduga hal ini terjadi karena lemahnya proses pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh PSBK, salah satu dari proses tersebut adalah pembinaan lanjut.

Kondisi sesungguhnya eks warga binaan sosial PSBKPL adalah setelah dikembalikan ke masyarakat, apakah mereka mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai individu dan warga masyarakat setelah dilakukan pelayanan dan rehabilitasi di panti? Kondisi ini dapat diketahui ketika dilaksanakan pembinaan lanjut oleh petugas sosial, sehingga perlu dikaji bagaimana proses pelayanan dan pelaksanaan pembinaan lanjut terhadap eks WBS yang dilakukan oleh PSBKPL. Pengkajian ini bertujuan mendeskripsikan, proses pelayanan dan rehabilitasi yang dilaksanakan PSBKPL, pemahaman petugas panti terhadap pembinaan lanjut dan bagaimana pelaksanaannya, hasil pembinaan lanjut yang dilaksanakan panti, dan faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan pembinaan lanjut. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Pelayanan Tunasosial dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan oleh PSBKPL.

B. Kajian Teori

<http://isearch.baby-lon.com>. Analisis Kebijakan pengembangan panti sosial, diakses 2 oktober 2012), tugas dan tanggung jawab panti sosial mencakup empat kategori, meliputi mencegah timbulnya permasalahan sosial penyandang masalah dengan melakukan deteksi dan pencegahan sedini mungkin, melakukan rehabilitasi sosial untuk memulihkan rasa percaya diri, tanggung jawab terhadap keluarganya, meningkatkan kemampuan kerja fisik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kemandiriannya di masyarakat; Mengembalikan PMKS ke masyarakat melalui penyiapan sosial, penyiapan masyarakat agar mengerti dan mau menerima kehadiran kembali mereka, dan membantu penyaluran ke pelbagai sektor kerja dan usaha produktif; Melakukan pengembangan individu dan keluarga, seperti mendorong peningkatan taraf kesejahteraan pribadinya, meningkatkan rasa tanggung jawab sosial untuk berpartisipasi aktif di tengah masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan iklim yang mendukung pemulihan, dan memfasilitasi dukungan psikososial dari keluarganya.

Pelayanan sosial yang dimaksud menurut Romansyshyn yang dikutip oleh Fahrudin (2011) adalah sebagai usaha untuk mengembalikan, mempertahankan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga melalui: sumber-sumber sosial pendukung, proses untuk meningkatkan kemampuan individu dan keluarga dalam mengatasi stres dan tuntutan kehidupan sosial. Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Rehabilitasi sosial dalam UU No 11 angka 8 pasal 1 diartikan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan

Pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis berdasarkan profesi pekerjaan sosial di PSBKPL dilaksanakan oleh pekerja sosial fungsional dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan. Keputusan Menpan Nomor: Kep/03/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka KreDirektoratnya dijelaskan bahwa pelayanan sosial di dalam panti dilakukan melalui proses: Pendekatan awal, Asesmen, Perencanaan intervensi, Intervensi, Evaluasi dan terminasi, Bimbingan lanjut. Tahapan pelayanan sosial dan rehabilitasi gelandangan dan pengemis berdasarkan Standard Pelayanan Minimal (2007) meliputi: Pendekatan awal, yang meliputi kegiatan orientasi dan konsultasi, identifikasi, motivasi dan seleksi, penerimaan, meliputi kegiatan registrasi, penempatan dalam program rehabilitasi sosial, pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*), pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial dan mental, bimbingan sosial, bimbingan fisik dan keterampilan kerja. Rehabilitasi sosialisasi meliputi: bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat, bimbingan sosial hidup bermasyarakat, pemberian bantuan stimulan usaha produktif, bimbingan usaha kerja (*magang*), dan penyaluran. Bimbingan lanjut meliputi: peningkatan kehidupan bermasyarakat dan peran serta dalam pembangunan, bantuan pengembangan usaha, bimbingan peningkatan keterampilan dan bimbingan pemantapan kemandirian, peningkatan usaha kerja. Evaluasi dan terminasi.

Bimbingan lanjut (pembinaan lanjut) merupakan salah satu proses pelayanan dan rehabilitasi yang diarahkan pada penerima pelayanan dan masyarakat untuk lebih dapat memantapkan dan meningkatkan serta mengembangkan kemandirian penerima pelayanan dalam kehidupannya. Tahapan ini merupakan esensi pemberdayaan dan upaya stabilisasi perubahan dan perkembangan WBS setelah kembali ke masyarakat. Bimbingan lanjut merupakan salah satu tahapan penting yang harus mendapat perhatian yang lebih intensif. Selama dalam pelayanan dan rehabilitasi di panti, warga binaan sosial selalu didampingi pekerja sosial. Ketika WBS kembali ke masyarakat juga senantiasa harus mendapatkan pendampingan untuk memonitor perkembangan eks WBS, berupa bimbingan lan-

jut yang dilakukan oleh pekerja sosial, yang diharapkan dapat mengetahui pemasalahan yang dihadapi dan kebutuhan eks WBS, sehingga tindak lanjut dari bimbingan lanjut dapat dilaksanakan.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode evaluasi dengan pendekatan kualitatif, merupakan pendekatan yang relevan untuk meneliti fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat, karena pengamatan diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik dan memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan, bukan berdasarkan pada variabel atau hipotesis. Lexy J Moleong (2004) yang mengatakan, bahwa tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. PSBK Pangudi Luhur (PSBKPL) Bekasi salah satu panti yang melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi terhadap gepeng. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan panduan wawancara terhadap eks warga binaan sosial, *focus group discussion* (FGD) dengan pekerja sosial, pejabat struktural, unsur yang terlibat dalam rehabilitasi dan pelaksanaan pembinaan lanjut dan dinas sosial, kemudian observasi terhadap kondisi eks WBS dan pelaksanaan pembinaan lanjut, serta telaah dokumentasi. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, meliputi reduksi data, penyajian, penafsiran dan menyimpulkan.

Hasil Penelitian: Gambaran Panti Sosial

Kelembagaan: Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur (PSBKPL) Bekasi berdiri berdasarkan SK Mensos 14 HUK/1994, tgl 23 April 1994, tentang Penamaan UPT pusat/panti/sasana di lingkungan Departemen Sosial RI, yang sebelumnya bernama Panti Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis dan Orang Terlantar (PRPGOT). Berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2009 tgl 23 juli 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di lingkungan Departemen Sosial RI, struktur organisasi PSBKPL terdiri dari 1 (satu) kepala,

1 (satu) Subbag Tata Usaha dan 2 (dua) seksi yaitu Seksi Program dan Advokasi, Seksi Rehabilitasi Sosial dan kelompok jabatan fungsional. Masing-masing seksi bertanggung jawab langsung kepada pimpinan panti.

Tujuan pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan PSBKPL adalah untuk memulihkan fungsi sosial gelandangan dan pengemis, antara lain dapat dilihat dari gelandangan dan pengemis yang mampu mengubah cara hidup dan mencari penghasilannya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat; gelandangan dan pengemis dapat dijangkau dan mau mengikuti program pelayanan dan rehabilitasi sosial; gelandangan dan pengemis mampu menjalankan fungsi dan peran sosialnya di masyarakat secara wajar (Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial, Dityanresos, 2007).

Sumber Daya Manusia (SDM): Jumlah pegawai PSBKPL 75 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 56 orang (76 persen), dan tenaga honorer 19 orang (24 persen), dengan tingkat pendidikan S2 1 orang, S1/D4 sebanyak 13 orang, D3 sebanyak 9 orang, SLTA 3 orang, SLTP 1 orang dan SD 1 orang. Sedangkan menurut jabatannya terdapat 4 orang pejabat struktural, 15 orang fungsional pekerja sosial, penyuluh sosial, arsiparis, psikolog, dokter umum, dokter gigi masing-masing 1 orang, 2 orang perawat, 10 orang instruktur, 4 orang Satpam, 6 orang tukang bangunan, 2 orang tukang kebun, 1 orang supir dan 7 orang *cleaning service* dan staf pendukung lainnya. Perbandingan antara pekerja sosial dengan WBS masih belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan, yaitu 1 berbanding 14 sampai 15, idealnya 1 berbanding 9 sampai 10 (standarisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial PSBK). Berdasarkan Standarisasi Panti, perbandingan antara pekerja sosial dan WBS adalah 1 : 5 (Kep.Mensos RI No. 50/HUK/2004). Menurut Kepala PSBKPL: "Saat ini pegawai baru sudah diarahkan untuk menjadi pekerja sosial, sehingga jumlah yang dibutuhkan dapat terpenuhi."

Tingkat pendidikan pekerja sosial, terbanyak setingkat SMA 12 orang, (2 orang di antaranya adalah SMPS), D3 (sosial) 1 orang dan sarjana sosial 3 orang. Hanya sebagian kecil yang sudah mengikuti pendidikan berkaitan dengan pelayanan yang berbasis kesejahteraan sosial.

Sebagian besar telah memiliki sertifikat pekerja sosial fungsional sesuai dengan jenjang fungsionalnya. Menurut salah satu pekerja sosial, "sertifikasi ini belum memuat kebutuhan pelayanan yang dilaksanakan pekerja sosial, karena sertifikasi hanya menetapkan bahwa pekerja sosial yang bersangkutan adalah fungsional pekerja sosial pada tingkat yang Direktorat tetapkan. Sedangkan pada pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan membutuhkan keahlian sesuai dengan permasalahan yang Direktorat tangani, seperti pekerja sosial anak, pekerja sosial remaja, pekerja sosial Lanjut Usia." Selain pekerja sosial, tenaga lain di PSBKPL adalah instruktur keterampilan. Sebagian instruktur yang terdapat di PSBKPL tidak memiliki sertifikat terkait dengan ilmu keterampilan yang diberikan kepada WBS. Meskipun demikian, mereka telah mendapatkan ilmu keterampilan langsung dari lembaga praktek keterampilan, atau belajar secara otodidak. Menurut kepala PSBKPL dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, "para instruktur cukup menguasai dan mahir dalam jenis keterampilan yang diberikan kepada WBS. Mereka juga bukan termasuk tenaga honor panti."

Sarana Dan Prasarana: PSBK Pangudi Luhur memiliki lahan seluas 51.616 M², terdiri dari 44.412 M² untuk bangunan (pondok WBS dan sarana pendukung pondok dll), bangunan kantor 4.204 M² dan 3.000 M² untuk lahan percobaan pertanian. Ruang kantor yang dimiliki adalah ruang kepala panti, ruang tata usaha, ruang bendahara, ruang seksi program dan advokasi sosial, ruang seksi rehabilitasi sosial, ruang pekerja sosial 2 unit, ruang psikologi, ruang bendahara, ruang dokter gigi. PSBKPL juga memiliki ruang untuk menunjang kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan, seperti ruang rapat, ruang tamu pekerja sosial, ruang tamu taman penitipan anak, ruang tamu kelas, ruang tamu poliklinik, ruang koperasi. PSBKPL juga didukung oleh berbagai jenis sarana peralatan kantor yang cukup lengkap, baik sarana kerja maupun sarana transportasi, tetapi diakui masih dalam jumlah yang terbatas terutama computer dan sarana transportasi. PSBKPL hanya memiliki 3 kendaraan roda empat dan 2 kendaraan roda dua sehingga masih belum memadai untuk operasional kegiatan.

Sarana pelayanan dan rehabilitasi:

PSBKPL memiliki 31 asrama untuk tempat tinggal WBS, masing-masing pondok terdiri dari 5 pintu, masing-masing pintu terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu dan 1 ruang dapur (sebagian tidak memiliki ruang dapur). Satu pintu dihuni oleh satu keluarga (ibu, bapak, anak usia sekolah), sedangkan keluarga yang memiliki anak remaja bergabung dengan remaja lain dalam satu pintu. Untuk bimbingan keterampilan PSBKPL memiliki 9 unit ruang keterampilan, ruang pendidikan, ruang TPA, aula, sarana kesenian, dua unit ruang rehabilitasi dan satu unit mushalla. Panti ini juga dilengkapi dengan sarana olah raga, sarana kesenian dan satu unit guest house. Untuk pelayanan kesehatan, terdapat poliklinik dan ruang rawat inap, sedangkan untuk kesejahteraan pegawai, PSBKPL memiliki rumah dinas, 1 unit tipe C, 14 unit tipe D dan 19 unit tipe E.

Gambaran Warga Binaan Sosial (WBS):

Pada umumnya WBS berasal dari DKI Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Karawang, Lebak Banten, Tangerang, Malang, Cianjur, Garut, Sukabumi, Lampung, Banyumas, Kendal, Kebumen, Jombang, Situbondo, Magelang, Jember, Banjarnegara, Sulawesi dan Kalimantan. Jumlah WBS perangkatan (6 bulan) 300 orang yang terdiri dari balita, anak usia sekolah, remaja dan orang tua serta lanjut usia yang masih produktif. Mereka ada yang datang dengan status keluarga (istri, suami, anak) ataupun sendiri (bujang/gadis, janda/duda). Tingkat pendidikan WBS yang dewasa bervariasi, mulai dari SD sampai tingkat SMA bahkan ada yang tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah. Sebagian besar WBS di PSBKPL berasal dari keluarga atau masyarakat yang rawan menjadi gelandangan dan pengemis sedangkan gelandangan dan pengemis murni hanya beberapa keluarga saja. Menurut pekerja sosial PSBKPL, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bertambah banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis di jalanan, sementara yang sudah terjun sebagai gelandangan dan pengemis juga dilakukan agar mereka tidak lagi hidup sebagai gelandangan dan pengemis.

Untuk mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di PSBKPL, calon WBS perorangan dan keluarga harus memenuhi persyaratan

yang ada, yaitu tidak memiliki penyakit menular atau kronis; tidak cacat fisik dan mental; tidak sedang berurusan dengan penegak hukum; bersedia mengikuti program pelayanan panti; usia produktif (secara fisik dan mental mampu dilatih). Sebelum masuk panti, kegiatan WBS adalah pengamen, pedagang asong, pemulung, peminta-minta atau tidak memiliki kegiatan apa-apa. Setelah masuk panti, WBS memilih sendiri jenis keterampilan yang diikuti, sedangkan bimbingan sosial lainnya harus diikuti oleh semua WBS. Penempatan WBS dalam pelayanan dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan asesmen jenis keterampilan yang tersedia di panti. Jenis keterampilan yang diikuti WBS adalah pertukangan kayu, las, montir motor, olah pangan, sablon, tata rias, montir mobil, tahu tempe, dan pertanian. Untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis bagi WBS yang belum mampu tulis baca, diberikan paket A, yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Bekasi. Jumlah WBS yang mengikuti paket A pada tahun 2009 sebanyak 45 orang, 2010 sebanyak 61 orang dan tahun 2011 sebanyak 29 orang. Sedangkan bagi WBS yang memiliki anak balita, juga tersedia TPA Bina Insani.

Proses Rehabilitasi Sosial: Pendekatan awal: dilakukan melalui sosialisasi program, orientasi dan konsultasi, identifikasi masalah, motivasi dan seleksi penerimaan. Sosialisasi program diawali dengan melakukan kontak dengan Dinas Sosial Tingkat II melalui surat pemberitahuan tentang penerimaan warga binaan sosial di PSBKPL. Pada tahap ini PSBKPL menyosialisasikan programnya pada dinas sosial setempat dan instansi terkait, untuk mendapatkan dukungan dan peran serta dalam pelaksanaan program. Pada tahap ini petugas panti sekaligus melakukan orientasi dan konsultasi tentang wilayah-wilayah yang menjadi kantong calon WBS untuk menumbuhkan peran serta aktif dari instansi terkait dan tokoh masyarakat. Peserta sosialisasi selain petugas sosial tingkat II, instansi terkait, diikuti juga tokoh masyarakat dan petugas kecamatan. Untuk tingkat Kelurahan dan lokasi calon WBS berada, sosialisasi dilakukan oleh dinas sosial. Pada saat yang sama pekerja sosial melakukan identifikasi masalah terhadap calon WBS dan

potensi lingkungan yang mendukung proses pelayanan dan rehabilitasi WBS ketika kembali dari panti, baik potensi alam, sumber daya manusia dan nilai setempat. Motivasi secara langsung dilakukan petugas panti hanya pada lokasi-lokasi terdekat dengan panti. Seleksi dilakukan terhadap gelandangan dan pengemis berdasarkan data yang diperoleh dari dinas sosial setempat dan gelandangan dan pengemis yang sudah dimotivasi oleh pekerja sosial untuk mendapatkan calon warga binaan sosial. Beberapa kendala dalam kegiatan ini antara lain: (a) Surat yang dikirim ke Dinas Sosial sering tidak sampai, karena nomenklatur Dinas Sosial bergabung dengan instansi lain, sehingga informasi tentang pelaksanaan sosialisasi tidak sampai ke petugas. (b) Beberapa tahun terakhir Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas panti atau petugas lainnya tidak secara langsung sampai ke jenjang calon WBS, sehingga petugas panti tidak bisa secara langsung memotivasi calon WBS, dalam kondisi seperti ini sering terjadi kesalahpahaman terhadap program yang akan dilaksanakan di PSBKPL. Calon WBS mengira adanya uang saku, atau akan ada jaminan pekerjaan setelah selesai mengikuti kegiatan di panti. Hal ini menimbulkan masalah setelah berada di panti. Mereka tidak mau mengikuti kegiatan panti, minta keluar atau secara diam-diam keluar dari panti (kabur). Kecuali pada lokasi terdekat, pekerja sosial melakukan sosialisasi dan motivasi secara langsung kepada calon wbas, seperti daerah Bekasi, DKI Jakarta, Bogor dan wilayah terdekat lainnya.

Penerimaan dan pengasramaan: Pada tahap penerimaan dilakukan registrasi, studi kasus dan penempatan dalam program rehabilitasi sosial. Registrasi merupakan seleksi yang kedua yang dilakukan oleh pekerja sosial dan psikolog, untuk memastikan calon WBS memenuhi syarat Direktorat terima sebagai WBS. Studi kasus, pada kesempatan ini pekerja sosial dan psikolog menggali informasi dan mempelajari latar belakang WBS dan riwayat permasalahan yang dihadapi. Pekerja sosial dan psikolog menggali informasi dari WBS dengan cara wawancara. Hasil wawancara dijadikan data dasar penempatan dalam pondok dan

dalam program rehabilitasi sosial sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki masing-masing WBS, tingkat pendidikan, serta disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PSBKPL. WBS yang berasal dari satu daerah, tidak direktorat tempatkan dalam satu pondok. Beberapa permasalahan terkait dengan penerimaan antara lain: (a) Seringnya WBS memilih untuk mengikuti jenis keterampilan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, kalau hal ini dipaksakan dikhawatirkan sampai pada waktunya pelayanan dan rehabilitasi selesai dilaksanakan, WBS belum menunjukkan kemampuannya dalam keterampilan yang dipilih. Sehingga sering terjadi penumpukan WBS dalam salah satu jenis keterampilan yang tidak mengharuskan kemampuan dimaksud, seperti olah pangan, tahu tempe dan pengolahan susu kedelai. (b) Petugas sering dihadapkan pada dilematis pada calon WBS yang datang sendiri dalam kondisi mengidap penyakit tertentu yang tidak memenuhi persyaratan tetapi membutuhkan bantuan. Menghadapi hal ini petugas mempertimbangkan latar belakang calon WBS, jika gelandangan dan pengemis murni tetap Direktorat terima sebagai WBS, dengan resiko pengobatan secara intensif ke Puskesmas.

Asesmen (Pengungkapan dan Pemahaman Masalah): Dilakukan sepanjang WBS menerima bimbingan dan rehabilitasi sosial di PSBKPL. Asesmen yang dilakukan pada awal penerimaan untuk menelusuri, menggali data WBS, faktor-faktor penyebab masalah, tanggapan, serta kekuatan dalam rangka membantu dirinya sendiri, yang kemudian dikaji, dianalisis dan diolah oleh tim yang sudah Direktorat tentukan, termasuk pekerja sosial dan psikolog, untuk membantu upaya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi sosialialisasi bagi WBS. Aspek-aspek dalam asesmen meliputi fisik, mental spiritual, sosial dan keterampilan. Asesmen juga dilakukan apabila WBS bermasalah di panti, baik masalah dalam keluarganya maupun dengan tetangga sesama WBS. Asesmen dilakukan oleh pekerja sosial, sedangkan penyelesaian masalah dilakukan oleh pembimbing pondok, tetapi jika melalui pembimbing belum terselesaikan, akan diadakan

case conference atau pembahasan kasus, yang melibatkan pekerja sosial, struktural, psikolog, pembimbing agama dan medis. Untuk mengupayakan penyelesaian masalah WBS, dilakukan *home visit*, untuk mengetahui lebih jauh kondisi keluarga sebelum masuk ke panti. Kendala yang dihadapi dalam asesmen meliputi: belum ada instrumen yang baku untuk melakukan asesmen; petugas asesmen/ asesmentor belum memiliki ilmu asesmen yang memadai sehingga hasil asesmen kadang kala tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi WBS.

Pelaksanaan Bimbingan dan Rehabilitasi

Sosial: Pelayanan dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis di PSBKPL mencakup: (a) Bimbingan sosial, direktorat tunjukkan ke arah tatanan kerukunan dan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Bimbingan sosial dilakukan melalui teori dan praktek hidup berteman, berelasi dan bersosialisasi; hidup bermasyarakat, bergotong royong, bertanggung jawab dan bertoleran; hidup tertib dan berperilaku sesuai aturan dan tata nilai yang berlaku di masyarakat; hidup selalu optimis, bekerja keras dan percaya diri; bimbingan pengetahuan dasar; kesehatan, keluarga berencana; kewirausahaan dan keteraturan bermasyarakat dan taat hukum. Teori bimbingan sosial dilakukan secara klasikal, WBS dikelompokkan berdasarkan latar belakang pendidikan (SD, SMP, SMA). Kemudian diskusi kelompok dan dinamika kelompok, serta terapi komuniti yang dilakukan melalui pertemuan pagi, bimbingan kelompok, curahan hati pengalaman hidup. (b) Bimbingan fisik dan kesehatan, merupakan bimbingan atau tuntunan untuk pengenalan dan praktek cara-cara hidup sehat secara teratur dan disiplin agar kondisi fisik selalu dalam keadaan sehat.

Pelayanan dan kegiatan yang mendukung bimbingan fisik dan kesehatan melalui pelayanan menu makanan yang diberikan dalam bentuk natura yang diberikan dalam 5 hari sekali. Bahan makanan yang diberikan per WBS adalah beras 2,5 kg, ikan/daging/sarden/ayam (diberikan bergantian), telur, teh, gula, kopi, minyak

goreng, indomie, garam, gas 3 kg dan lain lain yang diperlukan. Kemudian bimbingan fisik berupa olah raga, PBB, *outbound*, kebersihan ketertiban dan keindahan (K3) dan SKJ. Bimbingan kesehatan dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan di poliklinik milik panti, bimbingan hidup sehat, kesehatan reproduksi, penyuluhan HIV/AIDS dan pelayanan Keluarga Berencana. Khusus untuk ibu hamil, diadakan pemeriksaan kehamilan dan imunisasi. Anak balita, selain pemeriksanaan kesehatan secara rutin, juga diberikan imunisasi sesuai kebutuhan anak balita serta pemberian vitamin A. WBS sakit yang tidak bisa diobati di poliklinik panti, dirujuk ke Rumah Sakit Umum Bekasi, atau ke rumah sakit terdekat yang telah diadakan kerjasama seperti klinik, rumah bersalin, dan bidan. Dalam pemeriksanaan kesehatan, kadangkala terdeteksi penyakit berat diderita oleh WBS yang tidak terdeteksi saat penerimaan WBS, seperti HIV/AIDS dan narkoba. WBS seperti ini dirujuk ke panti lain yang sesuai dengan permasalahannya untuk penanganan lebih lanjut. Bimbingan fisik dan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan dibimbing oleh pekerja sosial bekerja sama dengan Polres Bekasi, Puskesmas dan RSUD.

Bimbingan Mental Spiritual: Bimbingan mental spiritual direktorat tunjukkan untuk memahami diri sendiri dan orang lain melalui bimbingan keagamaan, etika, budi pekerti dan disiplin diri. Bimbingan spiritual dilakukan melalui ceramah agama dua kali seminggu, pengajian 1 kali seminggu, belajar membaca Al Qur'an 1 kali seminggu. Bimbingan mental diberikan oleh pekerja sosial yang dianggap mampu dalam bimbingan agama, ceramah agama selain diberikan oleh petugas panti, juga bekerja sama dengan Departemen Agama dan Pesantren.

Bimbingan keterampilan kerja: Direktorat tunjukkan agar WBS terampil di bidangnya sehingga memungkinkan mampu memperoleh pendapatan yang layak sebagai hasil penda-yagunaan keterampilan kerja yang dimiliki. Masing-masing jenis keterampilan dibimbing oleh seorang instruktur yang didampingi oleh seorang pekerja sosial. Menurut pekerja sosial

PSBKPL, dalam bimbingan keterampilan pekerja sosial bertugas memantau dan memberi dorongan kepada WBS agar setiap bimbingan dilakukan dengan tekun. Keterampilan yang diberikan sesuai dengan minat dan bakat WBS yang mencakup pertukangan kayu, bengkel las, olahan pangan dan tahu/tempe, sablon, tata rias, montir mobil, montir motor, servis elektro, menjahit, budi daya perikanan dan pertanian. Menurut instruktur PSBKPL, “ruang yang digunakan untuk bimbingan keterampilan terasa sempit, sehingga membatasi ruang gerak WBS. Peralatan dan bahan keterampilan juga tidak mengikuti perkembangan pasar.”

Rehabilitasi sosialialisasi: dilakukan satu atau dua bulan sebelum terminasi atau pemulangan WBS. Kegiatan ini dilakukan ke lembaga pengirim untuk memberitahukan pemulangan WBS yang dikirim oleh lembaga atau dinas sosial setempat, karena telah selesai pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan PSBKPL, kemudian dijalin kerjasama dalam melaksanakan pembinaan lanjut, dengan harapan instansi terkait serta masyarakat dapat memfasilitasi eks WBS dalam mengembangkan keterampilan yang sudah di dapat dari PSBKPL. Kendala yang dihadapi petugas dan pekerja sosial dalam kegiatan ini: (a) Seringnya terjadi mutasi pejabat daerah, sehingga pemahaman tentang kegiatan PSBKPL masih kurang. Sehingga pekerja sosial harus mengulangi mensosialisasikan program agar mereka memahami kegiatan PSBKPL. (b) Waktu yang diberikan untuk rehabilitasi sosialialisasi hanya 3 hari untuk lokasi jauh dan 1 hari lokasi dekat cukup menyulitkan petugas dalam mengatur waktu terutama terkait dengan tingkat kesibukan pejabat daerah.

Rehabilitasi sosialialisasi WBS dilakukan melalui kegiatan Praktek Belajar Kerja (PBK) selama 1 bulan. Menurut pekerja sosial PSBKPL, bagi WBS yang dianggap belum menguasai atau belum mampu, tidak diikuti dalam PBK, bahkan bagi WBS yang sudah mampu pun tidak semua dapat diikutsertakan dalam PBK karena anggaran terbatas. PBK dilakukan melalui kerja sama dengan dunia usaha sesuai dengan jenis keterampilan WBS. Beberapa jenis keterampilan tertentu tersebut, seperti olah pangan, dilakukan

dengan mengolah makanan di panti, kemudian menjualnya sendiri ke masyarakat sekitar. Pada akhir pelayanan dan rehabilitasi sosial sebelum pemulangan, WBS diberikan paket kerja sesuai dengan jenis keterampilan. Paket ini merupakan bantuan stimulan usaha produktif berupa bahan dan peralatan kerja untuk melaksanakan praktek keterampilan yang sudah diberikan, bertujuan agar mereka memiliki matapencaharian dan berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Kasie Rehabilitasi PSBKPL, paket diberikan secara kelompok dan perorangan, sesuai dengan jenis keterampilan yang diikuti.

Penyaluran: diwujudkan dalam bentuk pengembalian ke masyarakat, menyalurkan ke tempat kerja, dan menyalurkan sebagai peserta transmigrasi. Penyaluran dilakukan setelah selesai masa bimbingan dan rehabilitasi. Hasil FGD diketahui, bahwa secara khusus penyaluran ke tempat kerja belum sepenuhnya dapat dilakukan, karena kepercayaan dunia usaha terhadap eks WBS masih rendah. Dunia usaha pernah mempekerjakan eks WBS tetapi banyak keluhan yang dihadapinya seperti keterampilan eks WBS yang masih kurang, sikap terhadap pekerjaan juga masih kurang, masih malas-malasan, setelah beberapa bulan bekerja sering meninggalkan pekerjaan tanpa pamit dan membawa beberapa peralatan kerja. Menurut pekerja sosial sikap eks WBS masih sulit dikendalikan ketika sudah kembali ke masyarakat. Kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemilik usaha sering disalahgunakan dengan membawa barang-barang dari tempat usahanya, sehingga berimbas kepada eks WBS lain yang benar-benar mau memanfaatkan keterampilan yang dimiliki dan benar-benar mau mengubah hidupnya. Untuk mencari sendiri pekerjaan dengan modal keterampilan yang dimiliki hasil bimbingan PSBKPL, eks WBS merasa kesulitan walaupun sudah menunjukkan sertifikat, menurut Eks WBS sertifikat yang didapat dari PSBKPL belum diakui.

Hasil FGD juga diketahui, bahwa penyaluran juga dilakukan dengan mengikuti WBS dalam program transmigrasi ke daerah Kalimantan Tengah, Gorontalo, Morotai dan Maluku Utara. Pekerja sosial dan Kasie Rehabilitasi sosial

PSBPKL mengatakan, proses untuk mengikuti program cukup rumit, calon transmigran harus mengikuti persyaratan sesuai ketentuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, seperti persyaratan KTP dan dokumen pendukung lainnya, yang membutuhkan biaya administrasi cukup besar, karena WBS bukan berasal dari warga setempat. Menurut Kasi Rehabilitasi sosial PSBPKL, bagi WBS yang belum terampil dalam keterampilan dan menurut penilaian pekerja sosial memiliki kemauan dan potensi untuk dikembangkan, masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan mengikuti bimbingan di PSBPKL.

Bimbingan lanjut, Evaluasi dan Terminasi: Merujuk pada Standar Pelayanan Minimal dan Pedoman Teknis, bimbingan lanjut merupakan serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada WBS dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemandirian WBS dalam penghidupan serta kehidupan yang layak. Bimbingan lanjut dilakukan setelah WBS kembali ke masyarakat. Evaluasi dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan proses rehabilitasi, untuk memastikan apakah proses pelayanan dan rehabilitasi secara keseluruhan dapat dilakukan dan berjalan dengan baik. Terminasi atau penghentian pelayanan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan, apakah WBS telah dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan mampu menjadi warga masyarakat yang baik. Pengakhiran pelayanan sedapat mungkin tidak menimbulkan konflik psikologis yang mengganggu WBS karena belum mampu mandiri.

Kegiatan Penunjang: kegiatan yang menunjang keberhasilan program kegiatan pokok seperti: Pernikahan masal, Direktorat tujuan bagi WBS yang belum memiliki buku nikah/akta nikah, dan bagi WBS yang kebetulan menemukan jodohnya di panti; Khitanan masal untuk anak dari keluarga WBS; Widy wisata yang dilakukan setiap angkatan, 6 bulan sekali; Mengikuti bazaar dan pameran, untuk menso-sialisasikan kepada masyarakat tentang visi misi dan program-program pelayanan dan rehabilitasi serta hasil-hasil shelter workshop dan produksi hasil WBS; Kegiatan Tim Reaksi Cepat

(TRC), membantu penanganan permasalahan sosial secara cepat, tepat dan terukur, terutama permasalahan gelandangan dan pengemis dan orang terlantar yang belum tertangani oleh dinas atau instansi terkait, sedangkan permasalahan sosial di luar gelandangan dan pengemis hanya sebatas mediator ke lembaga kesejahteraan; Bhakti sosial; dilakukan bersama dengan masyarakat sekitar, kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan lingkungan perumahan sebagai upaya menjaga dan mengantisipasi banjir yang setiap musim hujan PSBKPL Pangudi Luhur mengalami banjir

Beberapa jenis Pelayanan dan rehabilitasi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya yaitu memberikan pelayanan berkelanjutan untuk lebih menghasilkan kesejahteraan eks WBS, PSBKPL menyusun rencana program kegiatan sebagai berikut: Pemberian Jaminan hidup kepada eks WBS sebesar Rp. 1.500.000,- per keluarga untuk jangka waktu 3 bulan pertama setelah terminasi. Pelayanan Home care bagi Gelandangan dan Pengemis luar panti. Memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 30 orang atau 30 keluarga eks WBS. Shelter work shop sebagai lanjutan dari instalasi produksi guna memantapkan kemandirian eks WBS. *Famili group suport*; keterlibatan keluarga (tokoh masyarakat) dalam kegiatan rehabilitasi sosial PSBKPL.

Pelaksanaan Pembinaan Lanjut: Kebijakan, dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis, PSBKPL menggunakan panduan Standarisasi Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis (2007), dan Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gepeng Sistim Panti (2006) yang disusun oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Tunasosial. Pekerja sosial sebagai pelaksana pembinaan lanjut mengatakan, sampai saat ini PSBKPL belum memiliki acuan atau panduan khusus untuk melaksanakan pembinaan lanjut, baik yang disusun oleh instansi lain maupun yang disusun oleh PSBKPL sendiri. PSBKPL memiliki instrumen yang disusun oleh pekerja sosial dan seksi rehabilitasi sosial sehingga diperkirakan dapat memenuhi tujuan pembinaan

Tujuan pembinaan lanjut adalah untuk lebih memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian WBS dalam kehidupan dan penghidupan yang layak. Pada pembinaan lanjut bukan hanya sekedar melihat kondisi WBS, tetapi serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh petugas pelaksana pembinaan lanjut yang diarahkan kepada WBS dan masyarakat. Berdasarkan Panduan Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Gepeng Sistim Panti (2006), tahap bimbingan yang dilakukan adalah bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan peran serta dalam pembangunan. Kegiatan bimbingan atau tuntunan untuk lebih memantapkan kemampuan penyesuaian diri dalam tata hidup bermasyarakat dan keikutsertaan mereka dalam proses pembangunan sesuai dengan kemampuannya. Bantuan pengembangan usaha dan bimbingan peningkatan keterampilan, yang diarahkan kepada WBS dalam bentuk pemberian bantuan ulang baik berupa peralatan dan bahan permodalan maupun pemantapan keterampilan, sehingga jenis dan jumlah usahanya lebih berkembang. Bimbingan pemantapan kemandirian atau peningkatan usaha kerja, guna dapat meningkatkan usaha ekonomis produktif, sehingga dapat mengembangkan jenis dan jumlah penghasilannya. Dalam pelaksanaannya, tidak semua WBS yang disalurkan dilakukan pembinaan lanjut, karena terbatasnya anggaran

Pemahaman dan Pelaksanaan Pembinaan

Lanjut: merupakan rangkaian kegiatan bimbingan, yang berada dibawah koordinasi seksi Rehabilitasi Sosial PSBKPL. Adanya kekurangan pemahaman antara pengertian pembinaan lanjut dan evaluasi yang dilakukan oleh PSBKPL, mengakibatkan pelaksanaan pembinaan lanjut dan evaluasi sering dilakukan secara bersamaan di lokasi yang sama. Perbedaannya hanya lama waktu, pembinaan lanjut dilakukan 4 hari, sedangkan monev dilakukan selama 3 hari. Apabila mengacu pada buku panduan, pembinaan lanjut dan evaluasi memiliki pengertian yang cukup jelas. Bimbingan lanjut merupakan rangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada eks WBS dan masyarakat, guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian WBS dalam kehidupan serta peng-

hidupan yang layak. Evaluasi untuk memastikan apakah proses pelayanan dan rehabilitasi berlangsung sesuai rencana yang telah Direktorat tetapkan sehingga dapat dilakukan pengakhiran pelayanan. Pembinaan lanjut oleh PSBKPL diartikan untuk mengetahui kondisi eks WBS setelah dipulangkan ke masyarakat dan keluarga, terutama dalam pemanfaatan paket yang diberikan, pekerjaan, kondisi ekonomi, tempat tinggal, yang dilaksanakan tiga bulan setelah pemulangan WBS ke masyarakat. Jika melihat tahapan pembinaan lanjut berdasarkan panduan teknis, idealnya evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan pembinaan lanjut, pada tahap evaluasi dapat diketahui apakah dari hasil pembinaan lanjut tersebut, eks WBS masih membutuhkan pendampingan atau sudah bisa Direktorat terminasi.

Pembinaan lanjut dilakukan oleh pekerja sosial dan seksi rehabilitasi sosial, karena keterbatasan anggaran, sehingga pembinaan lanjut dilakukan hanya kurang dari 1 persen eks WBS dan hanya pada wilayah yang terbanyak eks WBS-nya. Menurut pekerja sosial PSBKLP, ada ketidaknyamanan terhadap eks WBS ketika melakukan pembinaan lanjut, karena pekerja sosial tidak melakukan tindakan apapun yang terkait dengan kondisi eks WBS, pekerja sosial hanya melakukan wawancara dan observasi terhadap eks WBS. Mengacu pada buku Standard Pelayanan Minimal Gelandangan dan pengemis, pada tahap pembinaan lanjut ada tiga kegiatan yang harus dilakukan terhadap eks WBS, tetapi ketiga kegiatan tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh petugas pembinaan lanjut. Seyogyanya kegiatan tersebut harus dilakukan sebagai wujud dari pembinaan lanjutan terhadap eks WBS, seperti adanya tambahan modal usaha baik berupa materi maupun peralatan kerja berdasarkan hasil evaluasi untuk pengembangan usaha yang dilakukan oleh eks WBS, sehingga tujuan pelayanan dan rehabilitasi yang dilaksanakan di PSBKPL dapat terwujud.

Pembinaan lanjut dilaksanakan selama 4 hari, baik di wilayah luar Jawa (Kalimantan, Gorontalo) maupun wilayah Jawa. Menurut pekerja sosial, bagi WBS yang mengikuti trans-

selalu dilakukan pembinaan lanjut. Wilayah transmigrasi merupakan wilayah dengan transportasi yang cukup sulit, karena harus menggunakan transportasi udara, darat bahkan sungai, sehingga membutuhkan dana transportasi lokal untuk menjangkau lokasi eks WBS. Pekerja sosial yang melakukan pembinaan lanjut sering kesulitan dengan biaya transportasi yang ada, sementara belum ada kerjasama yang intensif dengan instansi sosial dan instansi terkait setempat dalam pelaksanaan pembinaan lanjut. Instansi sosial menganggap bahwa kegiatan tersebut sepenuhnya merupakan kegiatan PSBKPL yang tidak perlu adanya keterlibatan instansi lain. Alasan lain, instansi terkait tidak memiliki anggaran untuk ikut melaksanakan pembinaan lanjut. WBS merupakan warga setempat, sudah seharusnya instansi terkait setempat (lembaga pengirim) ikut bertanggung jawab melakukan pembinaan lanjut terhadap perkembangan kesejahteraan eks WBS, bahkan ikut serta memberikan modal pengembangan usaha eks WBS. Dengan demikian peluang tercapainya peningkatan taraf hidup eks WBS akan lebih besar.

Dalam pelaksanaan *focus group discussion* (FGD), petugas instansi terkait mengatakan, mereka tidak tahu apakah warga binaan sosial PSBKPL yang berasal dari daerahnya sudah selesai mengikuti rehabilitasi atau belum, demikian juga dengan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh PSBKPL, sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan lanjut. Hal ini terkait dengan rehabilitasi sosialialisasi yang dilaksanakan oleh PSBKPL hanya pada lokasi-lokasi tertentu saja, menyebabkan beberapa instansi terkait tidak mendapatkan informasi secara langsung tentang kegiatan pelayanan dan rehabilitasi yang sudah dilaksanakan dan kondisi WBS yang berasal dari daerahnya. Terbatasnya anggaran merupakan salah satu hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan rehabilitasi sosialialisasi masih terfokus pada daerah yang terbanyak mengirim warga binaan sosial saja, sehingga tidak semua instansi pengirim mengetahui keberadaan WBS asal daerahnya.

Laporan hasil pembinaan lanjut yang disusun oleh seksi rehabilitasi sosial, belum sepenuhnya memuat hasil wawancara yang

dilakukan terhadap eks WBS, yang dapat dijadikan acuan perbaikan pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh PSBKPL. Padahal, melihat instrument yang dipakai pekerja sosial dalam melaksanakan pembinaan lanjut memuat kemungkinan permasalahan yang dihadapi oleh eks WBS dan pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi eks WBS setelah beberapa bulan selesai mengikuti bimbingan dan rehabilitasi di PSBKPL. Hasil pembinaan lanjut belum Direktorat tindaklanjuti, walaupun eks WBS sedang bermasalah. Terbatasnya anggaran mengakibatkan tindak lanjut pembinaan lanjut tidak dapat diwujudkan, terutama untuk pengembangan

Pekerja sosial seyogyanya ikut menyusun laporan hasil pembinaan lanjut, karena pekerja sosial sebagai pelaksana pembinaan lanjut yang mengetahui kondisi eks WBS setelah kembali ke masyarakat, dan memuat semua *pointer* instrumen yang dibuat bersama seksi rehabilitasi sosial. Pekerja sosial diharapkan mampu menganalisis permasalahan yang ada serta mengajukan hal yang harus ditindaklanjuti, baik oleh PSBKPL maupun Direktorat Rehabilitasi Sosial Tunasosial. Pembinaan lanjut menunjukkan juga sebagian eks WBS menjual *toolkit*, dengan alasan terdesak uang, tidak bisa dimanfaatkan, tidak tahu memanfaatkan karena keterampilan yang dimiliki belum mampu untuk melaksanakan usaha. Hal ini terkait dengan proses rehabilitasi yang dilakukan cukup singkat, belum sepenuhnya mampu mengubah sikap dan perilaku WBS, dan kondisi WBS yang pada umumnya berpendidikan rendah, sehingga dengan waktu 6 bulan belum mampu menyerap semua bimbingan (teori dan praktek) yang diberikan petugas panti. Namun sebagian WBS ada juga yang mampu mengembangkan keterampilan yang diterima di PSBKPL, dengan membuat usaha sendiri atau bekerja dengan orang lain. Masih ada keinginan dan kemampuan sebagian eks WBS untuk mengubah pola hidupnya dan mampu menjalankan fungsi dan peran sosialnya di masyarakat secara wajar, dengan mencari penghasilannya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Lanjut: Penghambat, Terbatasnya anggaran, mengakibatkan frekuensi

pembinaan lanjut setiap tahunnya hanya dilaksanakan satu kali pada satu lokasi selama 4 hari. Hal ini mengakibatkan sebagian besar perkembangan eks WBS tidak diketahui. PSBKPL belum bisa mengetahui keberhasilan secara maksimal dari pelaksanaan bimbingan dan rehabilitasi yang dilaksanakan. Lokasi pembinaan lanjut tidak selalu pada lokasi yang dekat, pekerja sosial terpaksa menambah ekstra perjalanan. Komponen transport local dalam anggaran juga tidak ada, sementara petugas harus menyewa kendaraan untuk menjangkau lokasi, terutama pada daerah transmigrasi. Peran serta instansi terkait/instansi pengirim belum ada, sementara petugas juga belum memiliki data awal mengenai keberadaan eks WBS, karena sebagian eks WBS tidak kembali ke daerah asalnya dan sebagian lagi sering pindah alamat. Tidak adanya bantuan lanjutan untuk pengembangan usaha, mengakibatkan eks WBS tidak dapat mengembangkan usahanya secara maksimal.

Pendukung: Meskipun pembinaan lanjut dapat dilaksanakan hanya di satu lokasi per tahun, dapat diketahui gambaran kondisi sebagian kecil eks WBS. Koordinasi yang baik antara pekerja sosial dan seksi Rehabilitasi sosial dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan lanjut meskipun berbagai kendala yang dihadapi. PSBKPL telah memiliki instrumen sebagai alat yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan lanjut.

Gambaran dan Analisis kasus Eks WBS: Hasil pembinaan lanjut berdasarkan studi kasus terhadap eks WBS PSBKPL diperoleh gambaran sebagai berikut. Informan eks WBS yang menjadi sasaran penelitian adalah berjumlah 13 orang, berusia 19 sampai dengan 43 tahun, berasal dari Tangerang, Magelang, Ciamis, DKI Jakarta (pasar senen, stasiun kereta Cikini). Jenis kegiatan sebelum masuk panti adalah ngamen, pemulung, buruh tani, serabutan di pasar dan tidak bekerja (gelandangan). Sebanyak 11 orang informan sudah berumah tangga dan memiliki anak 1-5 orang. Sebagian informan masuk PSBKPL berstatus bujang perempuan (gadis atau janda), bujang laki atau duda. Pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak

Motivasi informan masuk PSBKPL cukup beragam, ada yang ingin belajar keterampilan, masalah keluarga, daripada tidur di stasiun kereta, kemudian atas suruhan petugas dinas sosial atau panti, dijanjikan pekerjaan dan keterampilan. Selama di PSBKPL informan mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan, seperti bimbingan sosial, bimbingan keterampilan yang merupakan salah satu modal yang dapat dikembangkan untuk mendapatkan penghasilan. Jenis keterampilan yang diikuti adalah olah pangan (membuat bermacam jenis kueh, tahu tempe dan susu kedelai), montir motor, salon, dan sablon.

Sebanyak delapan orang informan eks WBS sudah bekerja, walaupun tidak sesuai dengan jenis keterampilan yang diikuti. Hal ini terjadi selain kesulitan mendapat pekerjaan di tempat-tempat usaha, juga belum mampu mandiri dilihat dari penguasaan keterampilan, dan ragu-ragu untuk memulai usaha, karena waktu yang digunakan untuk melakukan rehabilitasi hanya 6 bulan dan secara efektif 4 sampai 5 bulan, karena waktu 1 bulan dilakukan untuk melengkapi administrasi, sehingga terlalu cepat untuk dikembalikan ke masyarakat. Hal ini terbukti dari kondisi dua orang eks WBS yang mengikuti program rehabilitasi selama dua periode, ada perpanjangan waktu pelayanan dan rehabilitasi karena merasa belum mampu menerapkan keterampilan yang diberikan di panti. Tujuan utama pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi oleh panti bukan pelaksanaan keterampilan, tetapi dengan keterampilan yang dimiliki dapat menunjang perubahan sikap dan perilaku WBS, karena keterampilan merupakan salah satu alat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai dengan norma-norma masyarakat.

Menurut pekerja sosial PSBKPL, ketidakmampuan WBS bukan hanya terkait waktu yang hanya 6 bulan di panti, tetapi juga berkaitan dengan kondisi WBS yang kurang menyadari manfaat pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diberikan. Hal ini ditunjukkan oleh perilaku mereka yang sering malas-malasan ketika mengikuti bimbingan keterampilan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, tidak memiliki keterampilan, pasrah

pada nasibnya, pemahaman agama yang rendah, budaya ketika di luar panti banyak yang memberi sehingga ada harapan akan terus diberi dan memiliki uang walaupun tidak bekerja, dan adanya stigma masyarakat. Menurut instruktur beberapa WBS terlihat ada yang sebatas hanya sekedar mengikuti kegiatan yang ada, kelihatan malas-malasan, tidak memperhatikan. Pekerja sosial berulang kali memperingatkan tetapi tidak ada perubahan, sehingga setelah keluar panti belum mampu berbuat sesuatu untuk diri dan keluarganya, padahal konsep yang dikembangkan di panti adalah perubahan sikap dan perilaku serta hidup mandiri sesuai norma kehidupan di masyarakat.

WBS yang telah menekuni jenis keterampilan tertentu, seperti membuka bengkel motor dan tambal ban (1 orang), *showroom* motor yang ditempatkan di bagian bengkel motor (1 orang), depot isi ulang air minum (1 orang), pabrik *sparepart* (1 orang), jual nasi uduk, terima cuci setrika pakaian (1 orang), jualan gorengan dan es (2 orang), yayasan tenaga kerja (1 orang) dan dua orang kembali menekuni kegiatan semula yaitu sebagai pedagang asongan. Salah satunya sebagai pedagang asongan (rokok, kacang goreng, permen, tisu), sekaligus sebagai pengamen, dilakukan ketika dagangannya sepi dari pembeli. Kegiatan sebagai pedagang asongan merupakan kegiatan yang semula ditekuni sebelum masuk ke PSBKPL, yang bisa menghasilkan pendapatan antara Rp 30.000–Rp 50.000 per hari. Tempat tinggal informan sebagian besar kontrak, satu orang tinggal di tempat kerja, dan 3 (tiga) orang bersama orang tua. Mereka merasa kondisi tempat tinggal saat ini jauh lebih baik jika dibandingkan sebelum mengikuti rehabilitasi, karena sebelumnya ada yang tinggal di bawah jembatan sekitar Matraman, stasiun kereta Cikni, Pasar Senen. Sebagian tinggal di kampung halaman dengan kondisi rumah kontrak atau menempati rumah keluarga. Informan yang belum bekerja masih tinggal dengan orang tua.

Kasus Informan Eks Warga Binaan Sosial (WBS), Sesuai dengan tujuan pelayanan dan rehabilitasi gelandangan dan pengemis yaitu memulihkan fungsi sosial gelandangan dan pengemis, diantaranya dapat dilihat dari

kemampuan mereka merubah cara hidup dan cara mencari penghasilan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan mampu menjalankan fungsi dan peran sosialnya di masyarakat secara wajar. Berikut ini kondisi eks WBS yang sudah bekerja dan yang belum bekerja. **Eks WBS yang sudah bekerja,** jumlah delapan orang, dua orang di antaranya bekerja sesuai dengan jenis keterampilan yang diikuti di panti, yaitu bengkel motor. Sesuai atau tidak jenis pekerjaan yang ditekuni eks WBS dengan jenis keterampilan yang diikuti di panti bukan merupakan faktor utama dalam mendapatkan pekerjaan, yang penting eks WBS mampu berusaha mencari nafkah dengan cara tidak mengemis di jalanan. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan dari PSBKPL dalam melakukan pelayanan dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis. Menurut eks WBS, penghasilan yang didapat masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penghasilan yang diperoleh sebesar Rp 30.000-Rp. 50.000 per hari dimanfaatkan untuk mengontrak rumah sederhana dan kebutuhan sehari-hari.

Informan sangat bersyukur dengan kondisi ekonomi setelah dari panti, karena mereka mendapat penghasilan setiap hari walaupun sedikit. Mereka mengatakan, “daripada harus pulang kampung tidak ada pekerjaan tetap yang dapat dijadikan sumber penghasilan.” Berdasarkan ungkapan tersebut dapat dianalisis, bahwa kondisi ekonominya sudah jauh lebih baik dan kehidupannya lebih tenang dibandingkan sebelum masuk PSBKPL. Satu hal yang dapat diperhatikan, bahwa keberhasilan eks WBS pada satu sisi memiliki pekerjaan dan penghasilan, tetapi disisi lain sebagian mereka tidak mau pulang ke kampung halaman. Mereka sudah merasa nyaman berpenghasilan di kota besar, sementara di kampung tidak memiliki sumber penghasilan serta tidak punya lahan. Mereka banyak tinggal di kota sehingga menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah setempat. Menurut eks WBS, kalau mereka pulang ke daerah asal, mereka tidak bisa mengembangkan keterampilannya, karena tidak memiliki tempat usaha, dan khawatir hasil usahanya tidak ada

WBS tersebut, terlihat bahwa sebagian besar informan telah bekerja sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan tidak lagi menggelandang dan mengemis.

Eks Warga Binaan Sosial yang Belum Bekerja: Sebanyak 3 (tiga) orang, jenis keterampilan yang diambil sablon, olah pangan dan bengkel motor. Salah satu informan masih tinggal dengan orang tua dan belum menikah, dua orang lainnya sudah menikah dan tinggal bersama keluarga di rumah kontrakan. Mereka merasa belum menguasai keterampilan yang diberikan di panti, sehingga belum berani untuk membuka usaha sendiri. Keterampilan montir yang didapat dari PSBKPL, masih harus dipelajari lebih lanjut atau sebenarnya masih harus mengikuti pelayanan rehabilitasi. Informan lain merasa masih kebingungan dalam mempraktekan keterampilan yang sudah diperoleh di panti, karena paket yang diberikan tidak lengkap untuk melaksanakan atau mempraktekan keterampilan. Hingga saat ini mereka belum memperoleh pekerjaan karena sangat sulit, meskipun telah berusaha. Alasan lain peralatan/*toolkit* yang diberikan juga belum bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha karena tidak lengkap. Paket/*toolkit* sampai saat ini masih tersimpan, dengan harapan PSBKPL akan memberikan bantuan saat ada kunjungan dari panti, sehingga dapat dimanfaatkan untuk usaha. Informan lain belum berpikir untuk melanjutkan keterampilan yang sudah diperoleh di panti dan paket/*toolkit* yang diterima juga sudah dijual, karena terdesak

Eks WBS yang Menekuni Kegiatan Semula: Rehabilitasi yang telah dilaksanakan terhadap gelandangan dan pengemis ternyata belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan eks WBS, sebagaimana dialami 2 informan eks WBS. Sebelum masuk PSBKPL, mereka mencari nafkah dengan cara mengamen dan pemulung. Sulitnya mencari pekerjaan dan terbatasnya kemampuan untuk mengembangkan keterampilan yang diperoleh dari PSBKPL, mengakibatkan mereka kembali menekuni pekerjaan semula. Salah seorang dari informan ini mengaku sudah pernah mencoba untuk berjualan jajanan anak-anak (snak dan minuman), dengan modal hasil menjual

toolkit yang diberikan panti, tetapi belum dapat dikembangkan sebagai pekerjaan utama, karena penghasilannya masih sangat kecil. Modal utama yang seharusnya berkembang, habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya tidak bisa lagi melanjutkan usahanya karena kehabisan modal, sehingga kembali mengamen. Meskipun hingga saat ini masih ngamen, tetapi masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, serta berharap adanya dukungan dari panti untuk memulai usaha sendiri. Terlihat adanya perubahan sikap eks WBS, walaupun belum mampu mengembangkan potensi dirinya, karena beberapa hambatan yang dialami.

Uraian diatas menunjukkan, pentingnya peran pembinaan lanjut terutama bagi WBS yang mampu mengembangkan kemampuannya atau potensi dirinya. Pada kasus-kasus ini pembinaan WBS disertai tambahan modal baik untuk mengembangkan usaha maupun untuk melengkapi *toolkit*. Kondisi eks WBS yang kembali menekuni kegiatan semula, membuktikan pentingnya pembinaan lanjut untuk memaksimalkan hasil pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan PSBKPL, oleh instansi terkait, dinas sosial, dan lembaga pengirim. Eks WBS yang tidak lagi kembali ke daerah asal, panti berperan penuh dalam pembinaan lanjut.

Penutup

Kesimpulan: Proses Pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh PSBKPL berdasarkan buku panduan yang disusun oleh Direktorat Tunasosial, walaupun masih terdapat berbagai masalah, seperti peran instansi sosial sebagai lembaga pengirim belum optimal, lokasi rehabilitasi sosialialisasi dan pembinaan lanjut yang cukup jauh, alokasi dana belum proporsional. Belum ada instrumen baku untuk melakukan asesmen, petugas asesmen juga belum memiliki ilmu asesmen yang memadai sehingga hasil asesmen kadang kala tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi WBS. Adanya kerancuan pengertian pembinaan lanjut dan evaluasi oleh petugas panti sehingga pelaksanaannya seringkali bersamaan dan pada lokasi yang sama. Jika dilihat berdasarkan teori bahwa pengertian pembinaan lanjut dan

monitoring evaluasi cukup jelas, sehingga sasaran maupun hasil yang diharapkan akan berbeda. Pembinaan lanjut merupakan bagian integral dari proses pelayanan dan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh PSBKPL, tetapi dalam kenyataannya pembinaan lanjut belum mendapatkan porsi yang seimbang baik dari sisi dana, waktu dan sarana prasarana lain, sehingga seolah-olah pelaksanaan pembinaan lanjut hanya sekedar melakukan kunjungan siraturrahi dengan eks WBS. Karna pembinaan lanjut yang hanya dilakukan terhadap kurang dari 1 persen dari jumlah eks WBS pun belum ada tindak lanjut, meski eks WBS sedang menghadapi masalah. Belum ada keterlibatan instansi pengirim dan instansi terkait lainnya serta tokoh masyarakat dalam pembinaan lanjut, sehingga hasil pembinaan lanjut tidak maksimal. Perubahan sikap eks WBS Direktorat tunjukkan melalui berbagai usaha kerja yang dilakukan dan keinginan untuk meningkatkan usahanya. Walaupun secara ekonomi semua informan eks WBS masih belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari (dikatakan masih *pas-pasan*), tetapi demikian sudah memiliki penghasilan tetap, pendapatan secara harian yang cukup untuk kehidupan dalam katagori sangat sederhana (istilah yang dipakai yang penting makan walaupun tanpa lauk pauk). Adanya stigma masyarakat dan dunia usaha membuat eks WBS kesulitan mendapat pekerjaan dari dunia usaha, sertifikat yang diberikan panti tidak mampu merubah stigma tersebut. Bagi eks WBS yang sudah menguasai keterampilan yang diberikan, belum bisa membuka usaha sendiri, karena masih membutuhkan modal cukup besar dibandingkan dengan modal yang diberikan panti, seperti lahan, sewa lahan, peralatan yang lebih lengkap, materi. Pelayanan dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis yang dilakukan panti baru mampu menyelesaikan sebagian permasalahan yang dihadapi gelandangan dan pengemis.

Saran: Untuk memaksimalkan kemampuan pekerja sosial dalam melaksanakan rehabilitasi sosial khususnya dalam pelaksanaan asesmen terhadap gelandangan dan pengemis, maka perlu mengikutsertakan pekerja sosial dalam diklat

husus tentang pelaksanaan asesmen, sehingga selain pelaksanaan asesmen dapat dilakukan oleh pekerja sosial sesuai dengan kaidahnya, pekerja sosial juga dapat membuat instrumen asesmen yang baku. Dalam melaksanakan pembinaan lanjut, PSBKPL perlu menyusun panduan teknis yang dapat memperjelas pengertian dan pelaksanaan pembinaan lanjut, sehingga pelaksanaan pembinaan lanjut dapat dilaksanakan sesuai dengan semestinya. Kemudian perlu memaksimalkan peran pekerja sosial, selain sebagai pelaksana di lapangan, juga dalam penyusunan laporan lengkap, menganalisa permasalahan dan kebutuhan eks WBS, sehingga hasil pembinaan lanjut dapat Direktorat tindaklanjuti sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi eks WBS. Mengingat pembinaan lanjut adalah merupakan salah satu tahapan pelayanan dan rehabilitasi yang berperan penting dalam meningkatkan tarap hidup gepeng, maka perlu mendapatkan perhatian yang proporsional, baik dari segi lama waktu pelaksanaan, anggaran, sarana dan prasarana lain. Kemudian agar WBS dapat mengembangkan potensi dirinya di daerah asal, maka pada tahap sosialisasi dan rehabilitasi sosialialisai, PSBK perlu lebih menggali potensi daerah asal baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yang bisa dimanfaatkan dalam menunjang mengembangkan potensi WBS ketika kembali ke masyarakat. Selanjutnya perlu memastikan atau menegaskan kerjasama dengan instansi pengirim dan dinas sosial setempat untuk memfasilitasi eks WBS dalam mengembangkan potensinya di daerah asal, sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, seperti menyediakan tempat usaha atau membantu eks WBS dengan menghubungkan dengan sumber yang relevan. Untuk memaksimalkan hasil pelayanan dan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis, maka perlu kerjasama penanganan permasalahan WBS baik antar unit kerja dilingkungan Kementerian Sosial seperti dengan Direktorat Pemberdayaan Keluarga, Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Direktorat Banjamsos, secara bersama melakukan pelayanan dan pemberdayaan terhadap WBS dan eks WBS yang telah mengikuti rehabilitasi di PSBKPL,

sehingga permasalahan yang dihadapi eks WBS secara tuntas dapat direstorasi dan pada akhirnya terlepas dari kemiskinan yang menyebabkan mereka menjadi gelandangan dan pengemis.

Pustaka Acuan

Departemen Sosial RI, Keputusan Menteri Sosial RI No. 50/HUK/2004 *Tentang Standart Panti Sosial*: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

Departemen Sosial RI. (2006). *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Sistim Panti*, Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Departemen Sosial RI, (2007). *Standard Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, Direk-

torat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Fahrudin, A. (2011). *Kesejahteraan Sosial. Sebuah Pengantar*, Jakarta: P3KS Press.

Kementerian Sosial RI, (2011). *Data Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Pusdatin Kesos

Moleong, JL, (2004). *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Republik Indonesia, (1983). Keputusan Presiden RI Nomor 40/1983 *Tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*.

Soetarso. (1992). *Praktek Pekerjaan Sosial*, Bandung : Koperasi Sekolah Tinggi Ke-